



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**
REPUBLIK INDONESIA

LOGISTICS

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

2025

Direktorat Logistik
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan

DITJEN PDSPKP



#Logistics4competitiveness

#KITAPDS

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggungjawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2025 adalah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 dan Target Kinerja Direktorat Logistik Tahun 2025 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Logistik. Kegiatan utama level 2 yang mendukung program utama level 1 yaitu Kinerja Logistik Ikan Nasional adalah (1) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan; (2) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; (3) Kinerja Logistik Ikan; (4) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku; (5) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri; (6) Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik; (7) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik; (8) Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik; (9) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik; (10) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik; (11) Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik. Nilai Capaian Organisasi pada periode pelaporan Triwulan I sebesar 104,40

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemicu peningkatan kinerja organisasi Direktorat Logistik.

Jakarta, 8 April 2025

Direktur Logistik

Berny A. Subki

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Direktur Logistik

PENYUSUN

Tim Penyusunan Pelaporan Direktorat Logistik

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Logistik selama Triwulan I Tahun 2025, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Direktorat Logistik melakukan pengukuran terhadap kegiatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut: (1) Meningkatnya Penerapan Ketertelusuran Produk Perikanan (2) Meningkatnya Kinerja Logistik Ikan Dalam Negeri, dan (3) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Sasaran kegiatan di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Logistik dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yang terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 4 IKK bersifat tahunan, 6 IKK bersifat triwulan dan 1 IKK bersifat semesteran.

Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat tahunan yaitu Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik, Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik, Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik. Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik, Sedangkan indikator yang bersifat triwulan adalah Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan, Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kinerja Logistik Ikan, Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seluruh Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Logistik mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan aplikasi kinerja KKP, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode

pelaporan Triwulan I adalah sebesar 104,40 Nilai tersebut diperoleh dari capaian kinerja yang ditargetkan pada Triwulan I. Adapun rincian sebagai berikut :

- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen); target 4,1 Persen; capaian 4,1 Persen atau 100% dari target;
- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Persen); target 3 Persen; capaian 3 Persen atau 100% dari target;
- IKK Kinerja Logistik Ikan (Indeks); target 72 Indeks; capaian 72 Indeks atau 100% dari target;
- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku; target 5 Persen; capaian 5,8 Persen atau 116% dari target;
- IKK Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri; target 90 Persen; capaian 97 Persen atau 107,78% dari target;
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik; target 95 Persen; capaian 100 Persen atau 105,26% dari target;

Berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 02 Desember 2024, Direktorat Logistik mempunyai Pagu awal Rp.5.856.950.000,-. Dan berdasarkan tindaklanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, dan DIPA Rev 1 Nomor SP DIPA-032.06.1.622131/2025 tanggal 22 Februari 2025, Direktorat Logistik mendapatkan pagu sebesar Rp. 1.797.575.500,- dengan tagging blokir sebesar Rp. 1.114.962.500,- sehingga pagu efektif setelah efisiensi sebesar Rp.682.613.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp 378.205.645,- atau sebesar 55,41% terhadap pagu setelah efektif efisiensi, dan 6,46% terhadap pagu awal.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang logistik yang telah dicapai selama Triwulan I Tahun 2025 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di Triwulan selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2025 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai Triwulan I Tahun 2025, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia	3
1.5 Permasalahan Utama	4
1.6 Sistematisasi Penyajian	5
II. Perencanaan Kinerja	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.1.1 Sasaran Kegiatan	8
2.1.2 Kebijakan	8
2.2 Perjanjian Kinerja	8
III. Akuntabilitas Kinerja	10
3.1 Capaian Kinerja	10
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	12
3.3 Realisasi Anggaran	42
IV. Penutup	44
4.1. Kesimpulan	44
V. Lampiran	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal
Gambar 1.	Keragaan Sumber Daya Manusia	4
Gambar 2.	Layar tangkap dashboard nilai capaian Triwulan I Direktorat Logistik pada aplikasi kinerjaku	10
Gambar 3.	Pembahasan Aplikasi STELINA	27
Gambar 4.	Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengelola Gudang SRG	28
Gambar 5.	Kegiatan Pemantauan Kebutuhan, Ketersediaan, dan Harga Ikan pada HBKN	29
Gambar 6.	Pembahasan Penerapan Stelina	30
Gambar 7.	Sosialisasi Penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) Ke Pelaku Usaha Distribusi Ikan di Kota Bogor	33
Gambar 8.	Sosialisasi Penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) Ke Pelaku Usaha Distribusi Ikan di Kab Bekasi	34
Gambar 9.	Pembahasan Kuisisioner Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI)	37
Gambar 10.	Pengenalan Global Positioning System (GPS) dan Perangkat Lunak Pengolahan Geospasial	38
Gambar 11.	Pengenalan Global Positioning System (GPS) dan Perangkat Lunak Pengolahan Geospasial	40
Gambar 12.	Sosialisasi Pentingnya Pelaporan Stok Ikan di Cold Storage	42
Gambar 13.	Monev implementasi SIPCS dan operasionalisasi GBP 2024	43
Gambar 14.	Diskusi Bisnis Cold Storage mendukung Ketahanan Pangan	44
Gambar 15.	Internalisasi Rekomendasi Pemasukan Hasil Pemasukan Hasil Perikanan	46
Gambar 16.	Pembahasan Rencana Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Baku Pemindangan	47
Gambar 17.	Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2025	48

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Logistik	9
Tabel 2.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Logistik Periode Triwulan I Tahun 2025	11
Tabel 3.	Target dan capaian IK 1	13
Tabel 4.	Target dan capaian IK 2	19
Tabel 5.	Target dan capaian IK 3	23
Tabel 6.	Target dan capaian IK 4	27
Tabel 7.	Target dan capaian IK 5	32
Tabel 8.	Target dan capaian IK 6	37
Tabel 9.	Target dan capaian IK 7	38
Tabel 10.	Target dan capaian IK 8	39
Tabel 11.	Target dan capaian IK 9	40
Tabel 12.	Target dan capaian IK 10	41
Tabel 13.	Target dan capaian IK 11	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Sebagai wujud implementasi Peraturan dimaksud, dibutuhkan rencana kinerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Logistik termasuk dalam dokumen perencanaan kinerja yang memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Rencana kinerja tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan, Direktorat Logistik mengacu pada Rencana Strategis (Rancangan Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Tahun 2025-2029. Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Direktorat Logistik telah membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Logistik sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rancangan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Logistik telah menyusun Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2025. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2025 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2025 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.3 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Logistik menyelenggarakan fungsi: perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan logistik, tata kelola rantai pasok, penguatan pengadaan dan distribusi logistik, penguatan penyimpanan dan pemantauan logistik, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana logistik hasil kelautan dan perikanan, dan penerapan sistem ketertelusuran produk kelautan dan perikanan. Selain itu juga melaksanakan pelaksanaan urusan administrasi lingkup Direktorat Logistik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Nomor 178/DJPDSPKP.0/OT.320/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, telah disepakati Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP. Adapun Tim Kerja lingkup Direktorat Logistik sebagai berikut :

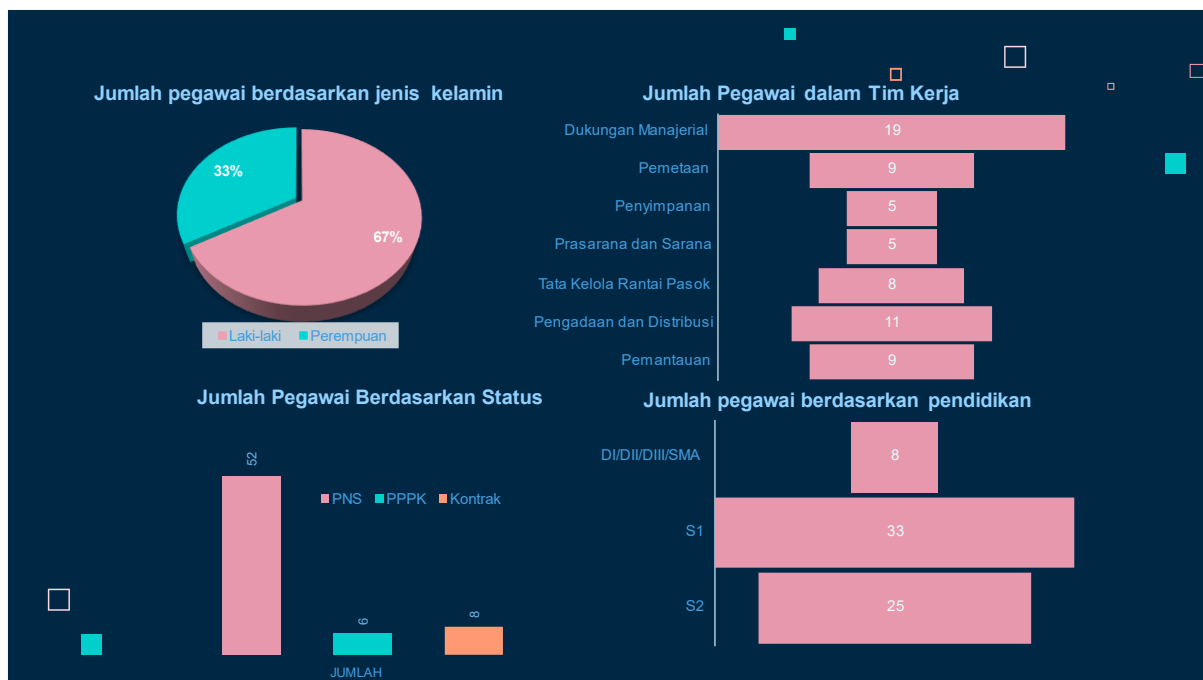
Direktorat Logistik dipimpin oleh seorang Direktur dan terdiri atas:

1. Tim Kerja Pemetaan;
2. Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok;
3. Tim Kerja Pengadaan, dan Distribusi;
4. Tim Kerja Penyimpanan;
5. Tim Kerja Pemantauan;
6. Tim Kerja Prasarana dan Sarana, dan
7. Tim Kerja Dukungan Manajerial.

1.4 Keragaan Sumber Daya Manusia

Pada Triwulan I Tahun 2025, Direktorat Logistik memiliki total 64 pegawai, terdiri dari 40 laki-laki dan 24 perempuan. Dari total pegawai tersebut, sebanyak 50 orang memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 8 orang lainnya merupakan tenaga kontrak. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai Direktorat Logistik memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (sarjana) sebanyak 33 orang, diikuti oleh latar belakang pendidikan Magister (S2) sebanyak 23 orang, dan latar belakang pendidikan Diploma (DI/DII/DIII/SMA) sebanyak 8 orang.

Tim Kerja Direktorat Logistik memiliki struktur sebagai berikut: Timja Dukungan Manajerial memiliki pegawai terbanyak dengan jumlah 17 orang, disusul oleh Timja Pengadaan dan Distribusi dengan 10 orang, Timja Prasarana memiliki 6 Orang, Timja Pemantauan masing-masing memiliki 8 orang, Timja Tata Kelola Rantai Pasok memiliki 8 orang serta Timja Penyimpanan masing-masing memiliki 6 orang.



Gambar 1. Keragaan Sumber Daya Manusia

1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang menjadi isu aktual logistik hasil kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya implementasi program penguatan logistik hasil kelautan dan perikanan, antara lain :

1. *Mismatch* Produksi dan Industri, serta Konsumen
2. Belum memadainya sarana dan prasarana di sentra produksi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
3. Belum optimalnya kelembagaan yang dapat memanfaatkan sarpras pasca panen yang tersedia;
4. Tidak meratanya potensi sumberdaya perikanan tangkap di wilayah timur dan wilayah barat;
5. Lebih majunya perkembangan ekonomi dan ketersediaan fasilitas di wilayah barat dibandingkan wilayah timur, sehingga sebagian besar investasi perikanan banyak terdapat di wilayah barat;
6. Lebih berkembangnya potensi perikanan budidaya di wilayah barat dibandingkan di wilayah timur, karena didukung faktor tarikan pasar atau permintaan yang tinggi, infrastruktur dasar yang memadai, baik ketersediaan input produksi seperti benih, pakan dan obat-obatan maupun dukungan sarana dan prasarana penunjang seperti transportasi, komunikasi dan lain-lain;
7. Adanya disparitas harga ikan di wilayah barat dan wilayah timur yang menjadi kendala jika ada rencana untuk memasarkan ikan dari wilayah Timur, yang

- produksinya cukup tinggi namun permintaannya rendah, ke wilayah Barat yang permintaannya tinggi, mengingat jumlah penduduk yang jauh lebih banyak;
8. Tidak tersedianya informasi mengenai pasokan dan permintaan yang memadai, sehingga sering terjadi pasokan di suatu daerah menjadi berlimpah pada suatu waktu, namun pada waktu yang lain pasokan sangat minim. Hal ini terjadi karena tidak adanya sistem informasi yang terkoneksi antara daerah produksi yang tersebar dengan daerah konsumsi yang umumnya berada di kota-kota besar.
 9. Belum optimalnya Pengelolaan gudang beku (BMN) yang dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung.
 10. Pengaruh Krisis Iklim, Perubahan iklim global menyebabkan perubahan suhu air laut, pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini dapat mempengaruhi populasi ikan, migrasi ikan, dan pola penangkapan ikan
 11. Kondisi Ekonomi Global, Fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan ketidakpastian politik dapat mempengaruhi harga ikan, permintaan pasar, dan investasi dalam industri perikanan
 12. Tingginya Biaya Pengangkutan Ikan, Kenaikan harga bahan bakar minyak, biaya operasional armada kapal, infrastruktur transportasi yang kurang memadai, dan jarak tempuh yang jauh dari lokasi penangkapan ikan ke pasar konsumen

1.6 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Logistik selama Triwulan I Tahun 2025. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan I Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan I Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2024;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Logistik, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Logistik serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Logistik;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Logistik Tahun 2025;

4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Logistik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Logistik sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Logistik. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Logistik sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Logistik serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Logistik untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional, maka perlu disusun beberapa target capaian pada pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029. Penyusunan target capaian ini juga memperhatikan agenda penguatan transformasi yang didukung KKP, sasaran strategis KKP yang didukung Ditjen PDSPKP, serta tujuan pembangunan PDSPKP tahun 2025-2029. Terkait agenda penguatan transformasi yang didukung KKP, Ditjen PDSPKP mendukung agenda transformasi ekonomi dan agenda ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJPN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025- 2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Kemudian pada tahap terakhir RPJPN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu **“Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”**. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung tiga misi, yaitu:

1. Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan,
2. Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan, dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

Dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian misi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka langkah-langkah strategis pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkaitan dengan Direktorat Logistik adalah mengembangkan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

2.1.1 Sasaran Kegiatan

Direktorat Logistik pada tahun 2025 mempunyai 3 sasaran kegiatan (SK) yaitu (1) Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku; (2) Meningkatnya Kinerja Logistik Ikan Dalam Negeri; (3) Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

2.1.2 Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan KKP berbasis Ekonomi Biru yaitu (1) penambahan luas kawasan konservasi laut, (2) penangkapan ikan terukur, (3) pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, (4) pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Dalam rangka mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan Ditjen PDSPKP periode tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan daya saing produk kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Dalam implementasi kebijakan dimaksud, strategi pembangunan yang berhubungan dengan Direktorat Logistik adalah Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yakni sistem manajemen rantai pasok ikan dan produk perikanan, bahan dan alat produksi, serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Kebijakan dan strategi pembangunan dimaksud dilaksanakan dalam satu program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan didukung oleh kegiatan pokok, yang salah satunya adalah Kinerja Logistik Hasil Perikanan.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2025. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Berdasarkan dengan DIPA awal Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 02 Desember 2024 Direktorat Logistik mempunyai Pagu awal Rp.5.856.950.000,-. Dan berdasarkan tindaklanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, dan DIPA Rev 1 Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 22 Februari 2025

Direktorat Logistik mendapatkan anggaran efektif setelah efisiensi sebesar Rp.682.613.000,-.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Logistik

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Penerapan Ketertelusuran Produk Perikanan	1.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen)	27,2
		2.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Persen)	20
2.	Meningkatnya Kinerja Logistik Ikan Dalam Negeri	3.	Kinerja Logistik Ikan (Indeks)	72
		4.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku (Persen)	20
		5.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri (Persen)	90
		6.	Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik (Persen)	80
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)	95
		8.	Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)	100
		9.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)	81
		10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	86
		11.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	87

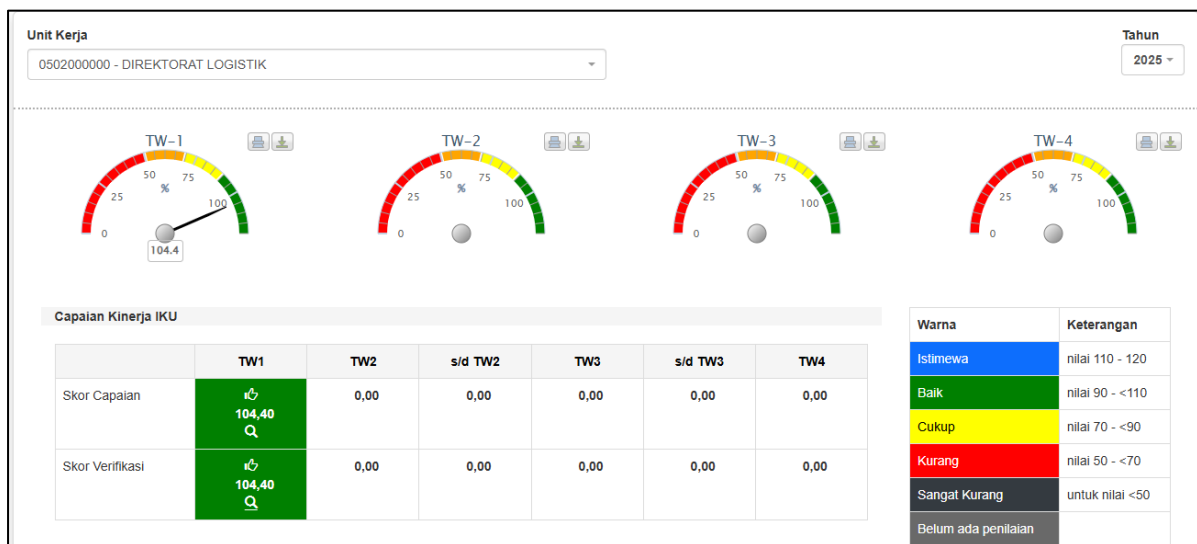
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Direktorat Logistik tahun 2025 memiliki 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 4 IKK bersifat tahunan, 6 IKK bersifat triwulan dan 1 IKK bersifat semesteran.

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari Januari sampai dengan Maret 2025. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerjaku sampai dengan Triwulan I sebesar 104,40.



Gambar 2. Layar tangkap *dashboards* nilai capaian Triwulan I
Direktorat Logistik pada aplikasi kinerjaku

Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Logistik s.d. Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Logistik Periode Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi sd TW I 2025	Persentase terhadap target (%)	
		Tahun 2025	TW I 2025		Tahun 2025	TW I 2025
1.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan	27,1	4,1	4,1	100	15,1
2.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	20,0	3,0	3,0	100	15
3.	Kinerja Logistik Ikan	72,0	72,0	72**	100**	100**
4.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku	20,0	5,0	5,8	116	29
5.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri	90,0	90,0	97**	107,78**	107,78**
6.	Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik	80,0	-	-	-	-
7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik	95,0	95,0	95,0	105,26	105,26
8.	Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik	100,0	-	-	-	-
9.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program	81,0	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi sd TW I 2025	Persentase terhadap target (%)	
		Tahun 2025	TW I 2025		Tahun 2025	TW I 2025
	Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik					
10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik	86,0	-	-	-	-
11.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik	87,0	-	-	-	-

****Prognosa**

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Logistik. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1. Meningkatnya Penerapan Ketertelusuran Produk Perikanan

3.2.1.1. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen)

Merupakan Peningkatan Persentase Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan dari periode sebelumnya ke periode yang sedang diukur. Ketertelusuran Produk Perikanan adalah kemampuan untuk melacak dan mendokumentasi produk perikanan dari awal hingga akhir. Mulai dari penangkapan hingga pemasaran. Tujuannya adalah menjamin penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, memberikan informasi terperinci tentang asal dan penanganan produk perikanan serta memastikan ketertelusuran rantai pasok dan produk perikanan secara elektronik.

Sistem ketertelusuran memerlukan metode yang tepat untuk menelusuri riwayat asal-usul suatu bahan pangan, proses produksi, pengemasan, distribusi/transportasi sampai kepada konsumen. Pelaksanaan implementasi STELINA juga dilakukan untuk monitoring realisasi dan distribusi produk hasil pemasukan hasil perikanan

Tabel 3. Target dan capaian IK 1

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Sd TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan	4,1	-	-	27,2	4,1	-	-	4,1	100,0	15,1	-	-

Berdasarkan tabel diatas pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir, target indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan pada triwulan I adalah 4,1 Persen dan target pada tahun 2025 adalah 27,2 Persen, Realisasi indikator ini pada triwulan I adalah 4,1 Persen atau setara 100% dari target triwulan I dan setara 15,1% terhadap target tahun 2025, Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha 001 Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA) dengan pagu awal sebesar Rp.450.000.000,- dan pagu efisiensi Rp.103.944.400,-. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp16.080.596,- atau sebesar 3,57% terhadap pagu awal dan 15,47% terhadap pagu setelah efisiensi.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan Aplikasi STELINA

Dilaksanakan di GMB 3 Lt 12, pada tanggal 21 Januari 2024, Dihadiri oleh: Direktur Logistik, Katimja Pemantauan, PT Tira Cipta Logistik, Timja Dukman dan Timja Lingkup Direktorat Logistik. Kegiatan ini membahas ketertelusuran hasil perikanan pada jasa logistik berkaitan erat dengan kebutuhan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk perikanan. Pertemuan ini dilaksanakan dalam

rangka pemantauan ketersediaan suplai bahan baku konsumsi PT Tira Cipta Logistik sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pasokan dan ketertelusuran bahan baku yang menjadi salah satu pilar penting dalam rantai pasok perusahaan. PT Tira Cipta Logistik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik dengan fokus pada pengelolaan distribusi bahan baku konsumsi untuk sektor industri dan ritel. Perusahaan ini memiliki peran strategis dalam:

- a. Penyediaan solusi logistik terpadu yang mencakup transportasi, pergudangan, dan manajemen distribusi.
- b. Menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku melalui koordinasi dengan mitra pemasok domestik maupun internasional.
- c. Mendukung implementasi sistem ketertelusuran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas rantai pasok.

Implementasi ketertelusuran yang dilaksanakan oleh perusahaan antara lain :

- a. Penggunaan sistem pencatatan digital untuk melacak asal-usul bahan baku.
- b. Pelaporan berkala kepada mitra dan pemangku kepentingan mengenai status ketertelusuran.
- c. Pelatihan internal untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang pentingnya ketertelusuran.
- d. Rekomendasi Pengembangan:
- e. Mengintegrasikan sistem ketertelusuran dengan platform teknologi blockchain untuk keamanan data.
- f. Melakukan audit rutin terhadap proses ketertelusuran.
- g. Mengembangkan program sosialisasi bagi pemasok terkait standar ketertelusuran yang diharapkan.

Dokumentasi



Gambar 3. Pembahasan Aplikasi STELINA

2. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengelola Gudang SRG

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengelola Gudang SRG dilaksanakan oleh Bappebti, Kemendag pada hari Selasa, 4 Februari 2025 secara daring. Tujuan untuk menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi pengelola gudang dalam Sistem Resi Gudang (SRG) dan SKKNI digunakan sebagai acuan dalam pelatihan serta uji kompetensi guna memastikan pengelola gudang memiliki keterampilan dan keahlian sesuai standar yang berlaku. dihadiri oleh Tim Bappebti Kemendag (Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Biro Pengawasan PBK, SRG dan PLK, pemeriksa PBK, Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK), KKP (Ditlog), serta para stakeholder SRG (PT KBI, Assosiasi Pengelola Gudang SRG Indonesia, Pengelola Gudang SRG, Lembaga Penilai Kesesuaian dalam SRG, Lembaga Pembiayaan Bank dan Non Bank).

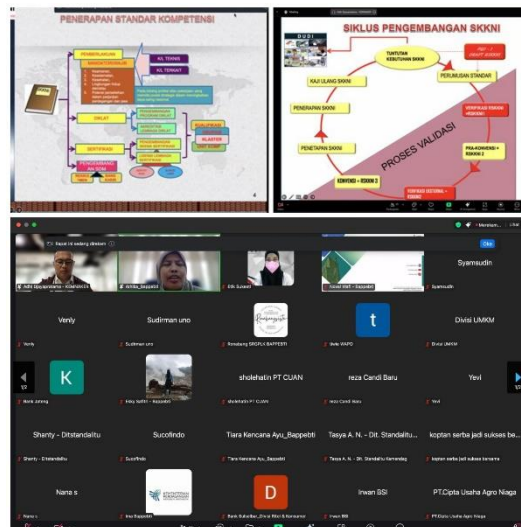
Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam Sistem Resi Gudang, mencakup; strategi peningkatan kompetensi SDM, standar sertifikasi, serta proses penyusunan dan penerapan SKKNI. Poin-Poin Utama dalam SKKNI:

- a. Pentingnya SKKNI untuk SRG dalam Integritas pengelola gudang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan SRG dan SKKNI diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelola gudang.
- b. Teknis Penyusunan SKKNI Berdasarkan pada amanat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Standar dikembangkan dengan mengacu pada PP 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Ada tiga jenis standar: SKKNI, Standar

Kompetensi Kerja Khusus (SKKK), dan Standar Kompetensi Kerja Internasional dan SKKNI harus valid, fleksibel, dan berorientasi pada hasil

- c. Strategi Peningkatan Kompetensi SDM;
- d. Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja
- e. Proses Pengembangan SKKNI
- f. Elemen Kompetensi dalam SKKNI
- g. Prosedur Sertifikasi Kompetensi
- h. Kriteria Unjuk Kerja & Unit Kompetensi
- i. Administrasi dan Tata Kelola SKKNI

Dokumentasi



Gambar 4. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pengelola Gudang SRG

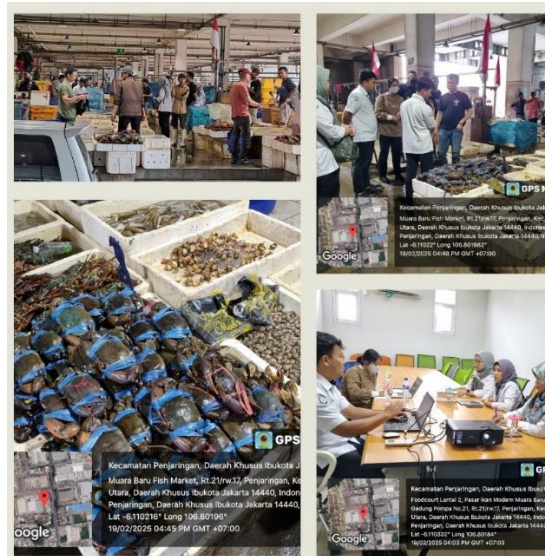
3. Kegiatan Pemantauan Kebutuhan, Ketersediaan, dan Harga Ikan pada HBKN

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18-19 Februari 2025 di wilayah Jakarta oleh Katimja Pemantauan dan tim. Lokasi kunjungan yaitu: PT Mahkota Samudera Jaya (MSJ), PT Graha Insan Sejahtera (GIS), dan Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru.

PT Mahkota Samudera Jaya (MSJ) Beralamat di Jl. Muara Baru Ujung Blok S No. 8 PPS Nizam Zachman Muara Baru Jakarta Utara beroperasi sejak 2014. Merupakan perusahaan perikanan dengan komoditas; Tuna, Skipjack Tuna, Mahi-mahi, Cakalang, Tenggiri, Layang, Marlin, Swordfish dan beberapa komoditas perikanan lainnya. Informasi mengenai harga ikan saat ini belum mengalami kenaikan, dan berdasarkan data di tahun-tahun sebelumnya, harga ikan tidak mengalami kenaikan pada saat hari besar keagamaan. Fluktuasi harga ikan lebih banyak dipengaruhi oleh musim panen ikan/jumlah stok ikan yang ada (hasil tangkapan/stok tersimpan di CS).

Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru, Di PIM tersedia berbagai jenis ikan seperti: udang, lobster, cumi, kerang, cakalang, tongkol, kembung, layang, bandeng, tenggiri, kakap merah, kuwe, bawal. Supplier ikan berasal dari berbagai daerah, diantaranya: Jakarta, Indramayu, Lampung, Tarakan, DIY, Purwakarta, Serang, Cianjur, Pati, Tulungagung. Pembeli ikan sebagian besar adalah pedagang yang berasal dari berbagai pasar di wilayah Jakarta, namun ada pula konsumen akhir (masyarakat umum) yang juga berbelanja di PIM.

Dokumentasi



Gambar 5. Kegiatan Pemantauan Kebutuhan, Ketersediaan, dan Harga Ikan pada HBKN

4. Pembahasan Penerapan STELINA

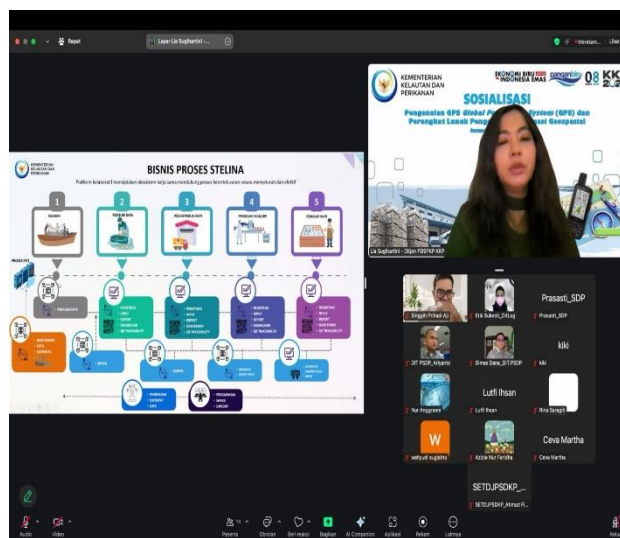
Dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025, dipimpin oleh: Katimja Wasdissar, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP. Peserta rapat: Katimja Pemantauan, Dit. Logistik, Penanggungjawab dan pelaksana Timja Pemantauan, Dit. Logistik, Perwakilan Timja Datin Humas, Setditjen PSDKP, Anggota Timja Wasdissar. Peran Direktorat Jenderal PSDKP dalam pengawasan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional yakni melakukan pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku usaha perikanan meliputi Pembudi Daya Ikan, Pelaku Usaha pengadaan Ikan, sortasi, grading, dan penyimpanan, Pengolah Ikan, serta Pemasar Ikan yang tidak melakukan penginputan data ke dalam aplikasi Stelina.

Direktorat Pengawas Sumber Daya Perikanan dan Direktorat Logistik menyepakati untuk menggunakan Permen KP No. 31 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (2) huruf a sebagai dasar pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku usaha perikanan yang tidak melakukan penginputan data di aplikasi Stelina. Direktorat Logistik menetapkan target untuk

tahun 2025 yakni sejumlah 36 pelaku usaha perikanan (baru) telah mengimplementasikan Stelina, yang didominasi oleh pelaku usaha importasi komoditas perikanan.

Direktorat Logistik akan memberikan hak akses aplikasi Stelina kepada Direktorat PSDP paling lambat pada minggu pertama bulan April 2025 dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional. Direktorat Logistik akan melakukan kegiatan sosialisasi penerapan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional kepada pelaku usaha dengan melibatkan Direktorat PSDP DJPSDKP

Dokumentasi



Gambar 6. Pembahasan Penerapan Stelina

3.2.1.2. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Persen)

Merupakan Kegiatan pembinaan kepada UMKM dan pelaku usaha distribusi ikan untuk penerapan cara distribusi ikan yang baik dalam rangka perolehan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI). UMKM adalah semua pelaku usaha distribusi ikan yang terdiri dari pelaku usaha pengadaan ikan, sortasi dan grading ikan, penyimpanan ikan, dan/atau transportasi ikan. Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha distribusi ikan tentang Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) untuk mempertahankan mutu dan keamanan hasil perikanan selama proses distribusi ikan.

Tabel 4. Target dan capaian IK 2

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Sd TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3,0	-	-	20,0	3,0	-	-	3,0	100,0	15,0	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir. Target indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada triwulan I adalah 3 Persen dan target pada tahun 2025 adalah 20 Persen, Realisasi indikator ini pada triwulan I adalah 3 Persen atau setara 100% dari target triwulan I dan setara 15% terhadap target tahun 2025, Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM 001 Pelaku Usaha yang dibina dalam rangka penguatan sistem logistic dengan pagu awal sebesar Rp.481.950.000,- dan pagu efisiensi Rp. 86.495.000,-. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp. 49.008.100,- atau sebesar 10,17% terhadap pagu awal dan 56,66% terhadap pagu setelah efisiensi.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) Ke Pelaku Usaha Distribusi Ikan di Kota Bogor

Kegiatan Sosialisasi Penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025 berlokasi di *Cold Storage* Gudang Samudra dan *Cold Storage* GJS (Gumuk Joni Sagala)

a. *Cold Storage* Gudang Samudra

Merupakan *Cold Storage* Milik Perorangan yang beralamat di JL. K.H Sholeh Iskandar, Cibadak Tanah Sareal

Kota Bogor. *Cold Storage* Gudang Samudra mulai beroperasi tahun 2008 dengan kapasitas 350 ton (terdiri 2 room @200 ton dan 150 ton). Kode KBLI yang dimiliki : 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan) dan 52102 (Aktivitas *Cold Storage*), KBLI 10213 (industri pembekuan ikan), KBLI10214 (industri pembekuan). *Cold Storage* Gudang Samudra sebenarnya tidak dilengkapi dengan alat pembekuan (ABF) dan tidak melakukan kegiatan pemindangan tetapi hanya memfasilitasi tempat usaha pengolah pindang yang membeli pindang di *Cold Storage* milik Gudang Samudra. Oleh karena itu, disarankan kepada *Cold Storage* Gudang Samudra untuk menghapus KBLI pembekuan dan pemindangan sehingga KBLI disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan, karena hal ini akan berdampak dengan kewajiban pada pemilik KBLI tersebut. *Cold Storage* digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan baku pindang. Ikan yang tersimpan saat ini sekitar 40 ton meliputi ikan makarel, salem, deho, layang, dan semar. Bahan baku saat ini diperoleh dari *Cold Storage* di Muara Baru. *Cold Storage* Gudang Samudra memiliki armada pengangkutan sendiri untuk mendistribusikan ikan ke pembeli. Rata-rata penjualan ikan per hari 2-3 ton, dengan pelanggan di sekitar Kota Bogor.

Saat ini *Cold Storage* Gudang Samudra sedang mengajukan penerbitan SKP namun terkendala terhadap penerbitan TDG dari dinas perindustrian sebagai persyaratan dalam penerbitan SS. Disampaikan oleh Tim dari Dit. Logistik terkait implementasi Permen KP no 9 Tahun 2024 tentang pengelolaan system distribusi ikan, pemilik *cold storage* Gudang Samudra akan menindaklanjuti dengan pengajuan permohonan penilaian CDIB untuk perolehan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan yang disesuaikan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan. Disampaikan pula kepada pelaku usaha, terkait pencatatan stok ikan pada *Cold Storage* Gudang Samudra melalui aplikasi SIPCS.

b. *Cold Storage* GJS (Gumuk Joni Sagala)

Merupakan CS Milik Perorangan yang beralamat di JL. Raya Pemda Pangkalan 3 No. 88 Kedung Halang ,Bogor Utara Kota Bogor. *Cold storage* ini mulai beroperasi tahun 2000 dengan kapasitas 407 ton (terdiri 2 room @400 ton dan 7 ton). Kode KBLI yang dimiliki : 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan). Memiliki Cabang di Cicurug, Ciawi, Cilebut, Leuwiliang, Cileungsi, Parung dan Citereup. *Cold Storage* digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan baku pindang. Ikan yang tersimpan saat ini deho, layang. diperoleh dari *Cold Storage* di Muara Baru. *Cold Storage* GJS memiliki armada pengangkutan sendiri untuk mendistribusikan ikan ke pembeli maupun cabang *Cold Storage*. Selain itu juga ke kota bogor, Sukabumi dan Depok. Saat ini *Cold Storage* GJS belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan, namun pelaku usaha sudah memahami pentingnya menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditangani. Setelah

dilakukan sosialisasi penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik pelaku usaha akan mengajukan permohonan penilaian agar dapat diterbitkan SPDI.

Dokumentasi



Gambar 7. Sosialisasi Penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) Ke Pelaku Usaha Distribusi Ikan di Kota Bogor

2. Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) Ke Pelaku Usaha Distribusi Ikan di Kab Bekasi

Kegiatan Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2025 berlokasi di PT. Citra Perisai Lintasindo Kabupaten Bekasi. PT. Citra Perisai Lintasindo (CPL) adalah perusahaan yang bergerak dibidang logistik yang berdiri sejak tahun 2019. Saat ini PT. CPL memiliki jaringan layanan di 34 provinsi dan 415 kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kode KBLI yang dimiliki: 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan), 52109 (Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya), 49431 (Angkutan Bermotor untuk Barang Umum), 49432 (Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus), dan 52295 (Angkutan Multimoda).

Memiliki karyawan tetap 6 orang dan karyawan tidak tetap (*driver on call*) sebanyak 10 orang. Armada pengangkutan yang dimiliki yaitu mobil berefrigrasi (2 unit), mobil box (12 unit), dan kendaraan roda dua (2 unit). CPL melayani pengangkutan barang seperti alat kesehatan dan farmasi, produk horeka, produk elektronik dan IT, buah-buahan, dan produk perikanan.

Standar higienis pada perusahaan yaitu : Bangunan berada di lingkungan bersih yang jauh dari tempat pembuangan sampah. Secara umum lingkungan bersih dan peralatan tertata rapi, tidak ada sampah berserakan. peralatan dan bahan pembersih diletakkan terpisah dari garasi mobil. Memiliki Panduan penerapan higienis yang

terdokumentasikan. Armada dilakukan pembersihan setiap kali setelah melakukan pengangkutan dan secara rutin dilakukan setiap hari Jum'at (1x/minggu).

Standar distribusi yang dimiliki perusahaan : Suhu selama distribusi disesuaikan dengan karakteristik produk/ permintaan client dan dipantau secara berkala menggunakan data logger, pengangkutan produk perikanan tidak dicampur dengan produk lain, Sebelum proses muat, pada sarana pengangkutan dilakukan penyesuaian suhu sesuai karakteristik produk, Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenis, volume, asal, tujuan pengiriman, dan suhu sebelum berangkat dan setelah tiba di tujuan. Ikan yang dikirim disusun berdasarkan rute, rute paling jauh dimuat terlebih dahulu.

Dokumentasi



Gambar 8. Sosialisasi Penerapan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) Ke Pelaku Usaha Distribusi Ikan di Kab Bekasi

3.2.2. Meningkatnya Penerapan Ketertelusuran Produk Perikanan

3.2.2.1. Kinerja Logistik Ikan (Indeks)

Logistik adalah sistem tata kelola arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan (*procurement*), penyimpanan (*storage*), transportasi (*transportation*), dan pelayanan (*delivery services*) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, mulai dari titik asal (*point of origin*) sampai dengan titik tujuan (*point of destination*) secara efektif dan efisien. Komponen penting dalam logistik dibedakan menjadi : (a) pengelolaan barang (*material management*) dan (b) distribusi.

Koridor Logistik Hasil Perikanan adalah mata rantai logistik yang berperan dalam menggerakkan produk kelautan dan perikanan dari titik asal (*point of origin*) ke titik tujuan (*point of destination*) yang meliputi jaringan

distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi dan jaringan keuangan. Koridor logistik hasil perikanan yang terkelola adalah terbentuknya sistem rantai pasok logistik ikan dari hulu ke hilir yang didukung oleh adanya data pemetaan dan data analisa kebutuhan, adanya sarana prasarana dalam rangka mendukung pengadaan dan penyimpanan logistik perikanan, adanya sistem telusur dan distribusi untuk mendukung konektivitas rantai pasok, serta adanya penataan rantai pasok pada koridor. Target indikator tahun 2024 adalah 8 (Delapan) koridor logistik yang terkelola. Jumlah koridor logistik hasil perikanan yang terkelola, yaitu:

- 1) Bitung – Surabaya/Jakarta,
- 2) Ambon - Surabaya/Jakarta, Kendari - Surabaya/Jakarta,
- 3) Makassar - Surabaya/Jakarta,
- 4) Kupang - Surabaya/Jakarta,
- 5) Mimika - Surabaya/Jakarta,
- 6) Biak - Surabaya/Jakarta, dan
- 7) Medan - Jakarta)

Data dukung IKK ini berupa dokumen laporan kegiatan pada lingkungan Direktorat Logistik dalam koridor logistik. Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola merupakan indikator lanjutan pada tahun 2023.

Tabel 5. Target dan capaian IK 3

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Sd TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Kinerja Logistik Ikan	72,0	71,9	-	72,0	72,0	71,9	73,3	72,0	100,0	100,0	-	-

Berdasarkan tabel diatas pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir, target indikator Kinerja Logistik Ikan pada pada tahun 2025 adalah 72 Indeks dan target pada triwulan I adalah prognosa sebesar 72 Indeks, Realisasi indikator ini pada triwulan I adalah prognosa sebesar 72 Indeks atau setara 100% dari target triwulan I dan setara 100% terhadap target akhir tahun 2025, Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat kenaikan target 0,13 %, tingkat pertumbuhan pada triwulan I jika dibandingkan dengan prognosa triwulan yang sama pada tahun sebelumnya adalah sebesar - 1%,

namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan setara 0,13%.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. ntuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu BMA Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP 001 Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP dengan pagu awal sebesar Rp.600.000.000,- pagu efisiensi Rp. 90.679.000,- . Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp. 83.393.905,- atau sebesar 13,90% terhadap pagu awal dan 91,97% terhadap pagu setelah efisiensi.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan Kuisioner Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI)

Tujuan kegiatan pembahasan kuisioner IKLI untuk menyempurnakan kuisioner IKLI 2025 dan penambahan pengukuran IKLI moda transportasi darat. Dalam rapat dilakukan pembahasan pembaruan dan penajaman pertanyaan serta pilihan jawaban termasuk relevansinya dalam kondisi saat ini. Pembaruan dilakukan pada semua pertanyaan dimasing masing responden.

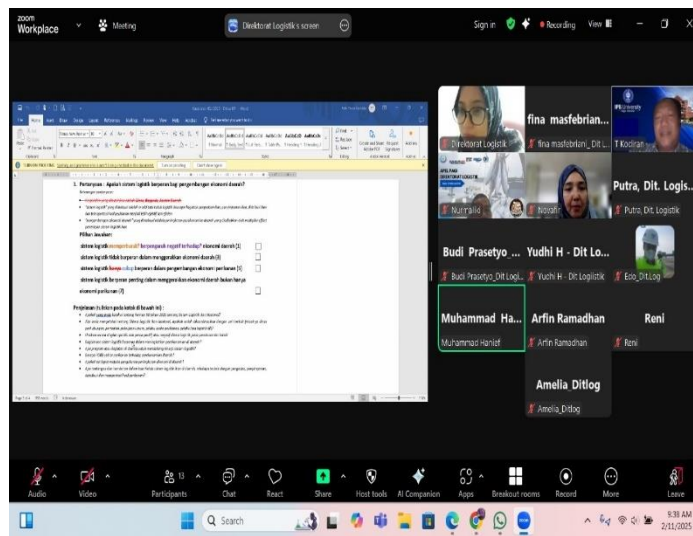
Latar belakang Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan konsep Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dengan tujuan membangun dan mengembangkan sistem manajemen rantai pasokan ikan dan hasil perikanan yang terintegrasi, efektif dan efisien untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Untuk mendalami performa dari sistem logistik ikan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Desain instrumen pengukuran kinerja menjadi tahapan awal yang harus dikembangkan dalam pengukuran kinerja yang dinyatakan sebagai indeks, sehingga perlu dilakukan pengukuran kinerja indeks logistik hasil perikanan.

Penghitungan Kinerja Logistik Ikan diharapkan dapat mendalami performa dari sistem logistik ikan sebagai sarana evaluasi kinerja sistem berdasarkan dimensi pembentuknya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut akan dapat diperoleh gambaran faktor-faktor yang kinerjanya sudah baik dan faktor yang kinerjanya masih rendah. Selain itu, pengukuran logistik ikan bertujuan untuk merumuskan kebijakan dimensi mana yg harus diperbaiki sehingga kinerja sistem logistik ikan dapat ditingkatkan.

Penghitungan kinerja logistik ikan dilakukan di koridor (1) Kendari – Surabaya/Jakarta, (2) Bitung – Surabaya/Jakarta, (3) Mimika – Surabaya/Jakarta, (4) Kupang – Surabaya/Jakarta, (5) Makassar –

Surabaya/Jakarta, (6) Ambon – Surabaya/Jakarta, (7) Medan – Jakarta dan (8) Biak – Surabaya

Dokumentasi



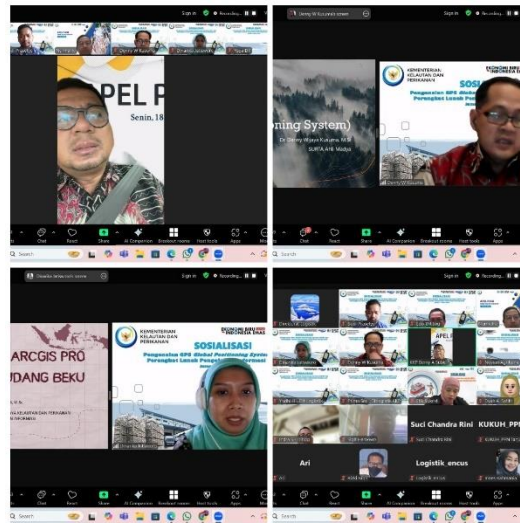
Gambar 9. Pembahasan Kuiser Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI)

2. Pengenalan Global Positioning System (GPS) dan Perangkat Lunak Pengolahan Geospasial

Tujuan kegiatan ini untuk pelatihan penggunaan perangkat GPS dan perangkat lunak QGIS dan ArcGIS dalam menampilkan informasi geospasial. Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dalam mengolah dan menyajikan data dalam bentuk spasial, maka Direktorat Logistik melalui timja Pemetaan melakukan pelatihan terkait Pengenalan GPS dan Perangkat Lunak Geospasial.

Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan ini : GPS (*Global Positioning System*) Memindahkan koordinat di GPS ke Qgis (.gpx to .shp). Pemanfaatan ArcGIS Pro untuk Data Gudang Beku yaitu menjelaskan pemanfaatan ArcGIS Pro untuk mengelola data gudang beku dan Gudang Beku dengan QGIS adalah Panduan dasar QGIS untuk memvisualisasikan dan mengolah data spasial Gudang Beku, mulai dari persiapan data tabular hingga tampilan dan analisis lokasi. Langkah-langkah untuk menampilkan dan mengolah data Gudang Beku (GB) menggunakan perangkat lunak QGIS.

Dokumentasi



Gambar 10. Pengenalan Global Positioning System (GPS) dan Perangkat Lunak Pengolahan Geospasial

3.2.2.2. Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku (Persen)

Merupakan kegiatan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan *Cold Storage* (SIP-CS) kepada pelaku usaha penyimpanan hasil perikanan. SIP-CS digunakan untuk memantau pergerakan ikan (masuk dan keluar) secara waktu nyata (real time). Pelaku usaha yang menerapkan SIP-CS adalah pelaku usaha yang telah melakukan registrasi sebagai pemilik gudang atau karyawan dan melakukan input data ke aplikasi SIP-CS secara berkala dengan nilai rerata okupansi $>1\%$ ditahun berjalan (dapat memperhitungkan pola musim ikan).

Penerapan SIP-CS dapat memberikan manfaat dalam mengontrol kesesuaian jumlah stok, penelusuran selisih stok dan memudahkan dalam mengendalikan dan memantau stok

Tabel 6. Target dan capaian IK 4

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Sd TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku	5,0	-	-	20,0	5,8	-	-	5,8	116,0	29,0	-	-

Berdasarkan tabel diatas pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir, target indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku pada triwulan I adalah 5 Persen dan target pada tahun 2025 adalah 20 Persen, Realisasi indikator ini pada triwulan I adalah 5,8 Persen atau setara 116% dari target triwulan I dan setara 29% terhadap target tahun 2025, Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. ntuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu AEE 001 Kemitraan dalam rangka pengadaan, distribusi dan penyimpanan dengan pagu awal sebesar Rp. 1.125.000.000,- pagu efisiensi Rp. 207.878.800,- Adanya blokir anggaran Automatic adjustment (AA) sebesar Rp. 56.833.800,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp. 63.761.892,- atau sebesar 5,67% terhadap pagu awal dan 42,21% terhadap pagu efektif.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Implementasi SIP-CS

Dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2025, dipimpin oleh Katimja Penyimpanan dan dihadiri perwakilan Setditjen PDSPKP, Pusluh KP, perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota Pendamping, Ketua Koperasi dan Kelompok penerima GBP TA 2024, penyuluh perikanan

serta perwakilan timja lingkup Direktorat Logistik. Kegiatan bertujuan untuk mensosialisasikan aplikasi SIPCS kepada pelaku usaha GBP, Dinas KP dan Penyuluh Perikanan.

Penerima GBP TA 2024 telah berhasil mendaftar SIP-CS :

- a. Koperasi Perikanan Sinergi Santo Pindang Jaya Bahari, Pancoran Jakarta Selatan dengan Kapasitas BP 50 ton tanpa ABF
- b. Poklahsar Berkah Bersama Ciasem, Kab. Subang Kapasitas BP 10 ton ABF 1 ton
- c. Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Benteng Laut Kec. Murhum, Kota Baubau dengan Kapasitas BP 10 ton ABF 1 ton
- d. Poklahsar Putra Barokah Kec. Banyusari, Kab. Karawang dengan Kapasitas BP 10 ton tanpa ABF
- e. Poklahsar Cimesir Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak - Banten dengan Kapasitas BP 30 ton tanpa ABF
- f. Koperasi Multi Pihak Catra Karya Nusantara Kec. Caringin, Kab. Garut, Jawa Barat, dengan Kapasitas 10 ton ABF 1 ton
- g. Koperasi Nelayan Indonesia Mina Lestari Kec. Cimerak, Kabupaten Pangandaran dengan Kapasitas 10 ton ABF 1 ton
- h. Lembaga Adat Panglima Laot Lhok Rigaih Kec. Setia Bakti Rigalih, Kab. Aceh Jaya dengan Kapasitas 10 ton ABF 1 ton
- i. KSU Insan Kamil Ciputat, Tangerang Selatan dengan Kapasitas 30 ton tanpa ABF
- j. Koperasi Mina Sari Dewata Kecamatan Karangasem dengan Kapasitas 10 ton ABF 1 ton

Dokumentasi



Gambar 11. Pengenalan Global Positioning System (GPS) dan Perangkat Lunak Pengolahan Geospasial

2. Sosialisasi Pentingnya Pelaporan Stok Ikan di *Cold Storage*

Dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025 di Raiser Ikan Hias Cibinong secara hybrid ,kegiatan dihadiri oleh sekitar 770 peserta yang terdiri dari perwakilan Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP, DKP Provinsi/Kab/Kota seluruh Indonesia, dan Pengelola *Cold Storage* baik milik pemerintah maupun swasta. Kegiatan diawali dengan arahan dan pembukaan oleh Sekretaris Ditjen PDSPKP, Bapak Machmud kemudian dilanjutkan pemaparan oleh 4 orang narasumber yang dimoderatori Pejabat Pembina Mutu Ahli Utama.

- a. KKP mendorong pelaku usaha CS yang sudah memiliki SKP dan SPDI sebagai mitra Badan Gizi Nasional untuk penyediaan bahan baku Makan Bergizi Gratis. Mitra tersebut harus berbadan hukum, dapat berbentuk Koperasi/Bumdes.
- b. Izin edar produk lokal perikanan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat untuk produk pangan industri rumah tangga, diluar itu diterbitkan oleh BPOM. Sedangkan untuk produk perikanan yang masih dalam bentuk mentah (loin tuna, filet ikan) cukup dengan memiliki SKP.
- c. Pengembangan usaha dari *Single Cold Storage* menjadi *Integrated Cold Storage*, dapat dilakukan dengan pengajuan permodalan oleh koperasi, UMKM atau usaha lainnya melalui LPMUKP KKP.
- d. Proses pengurusan Kartu Kusuka dapat didampingi oleh Penyuluh atau Dinas Perikanan setempat dengan melampirkan administrasi yang dipersyaratkan.
- e. Pengajuan bantuan pemerintah Gudang Beku dapat ditempuh dengan menyampaikan usulan sesuai juknis BP terbaru yang disampaikan melalui Dinas Perikanan terkait.
- f. Jenis ikan yang dimasukkan dalam aplikasi SIP-CS masih terbatas berdasarkan kebutuhan pengelola yang sudah menerapkan. Apabila ada penerap baru memerlukan penambahan jenis ikan dapat disampaikan ke Direktorat Logistik untuk dilakukan penambahan jenis ikan ke dalam aplikasi.
- g. Data ikan masuk yang masih tersimpan di CS selama 2 tahun masih akan tercatat di aplikasi sebagai data stok

Dokumentasi



Gambar 12. Sosialisasi Pentingnya Pelaporan Stok Ikan di Cold Storage

3. Monev implementasi SIPCS dan operasionalisasi GBP 2024

Kegiatan monev dilaksanakan di KSU Insan Kamil Kabupaten Tangerang pada tanggal 18 Februari 2025, Kegiatan dihadiri oleh Direktur Logistik, Katimja Penyimpanan dan tim, dan Katimja Prasarana dan sarana beserta tim, Ketua KSU Insan Kamil dan anggota, serta HMNI. GBP KSU Insan Kamil mengelola GBP 30 ton dan telah menerapkan SIPCS sejak 8 Januari 2025 dengan okupansi saat ini 10% terdiri dari ikan tongkol dan cakalang yang berasal dari Medan.

Koperasi berdiri sejak tahun 1998 dengan jumlah anggota 700 orang, memiliki bisnis dengan basis Pembinaan terhadap anggota melalui lini Simpan-Pinjam, Warung Tegal, Toko Serba Ada, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dan yang terbaru adalah Perikanan. Di bidang perikanan KSU Insan Kamil memiliki sejumlah reseller yang sudah mempunyai jaringan sebagai mitra kerja pemasar produk ikan beku kepada pelanggan. Untuk penerapan SRG dan SKP akan didampingi lebih lanjut dan KSU Insan Kamil untuk dapat berkoordinasi dengan Dinas KP Kab Tangerang terkait rekomendasi Kelayakan Pengolahan.

Direktur Logistik juga berdiskusi dengan ketua Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) dan anggota terkait dengan hulu-hilir perikanan dimana pencatatan produksi dan mutu ikan hasil penangkapan merupakan hal yang penting. HMNI saat ini beranggotakan 4.200 nelayan jaring dan pancing dengan jenis tangkapan ikan kembung dan tongkol.

HMNI berencana membuat kolam labuh melalui dana CSR dari PIK2, terkait hal tersebut disarankan HMNI untuk koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan DJPT KKP dan Dinas KP Kab Tangerang. Selain itu HMNI mendapatkan CSR untuk pemeriksaan

kesehatan nelayan dan keluarga nelayan, sehingga nelayan sebelum dan setelah melaut dapat memeriksakan kesehatannya sehubungan banyak nelayan yang terserang angin duduk pasca melaut. HMNI juga telah mengurus BPJS ketenagakerjaan bagi anggotanya.

Dokumentasi



Gambar 13. Monev implementasi SIPCS dan operasionalisasi GBP 2024

4. Diskusi Bisnis *Cold Storage* mendukung Ketahanan Pangan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2025, dihadiri Direktur Logistik, perwakilan Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP, perwakilan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, perwakilan Timja lingkup Direktorat Logistik, dan perwakilan Pelaku Usaha Cold Storage (CS).

Kegiatan diawali dengan arahan dari Direktur Logistik yang menyampaikan peluang Bisnis CS untuk mendukung Ketahanan Pangan, dimana secara nasional saat ini masih membutuhkan 250 ribu ton penyimpanan. Kemudian kegiatan dilanjutkan paparan dari Katimja Penyimpanan terkait model dan kategori bisnis CS, beberapa Lokasi yang sudah dilakukan kajian *feasibility study* oleh tenaga ahli, nilai investasi, serta model pengelolaan CS.

Sistem kerja sama yang ditawarkan dalam bisnis CS adalah pelaku usaha sebagai investor yang membangun CS, sedangkan pengelolaan dapat sekaligus dilakukan atau ditawarkan ke pihak ketiga. KKP akan membantu memfasilitasi terkait proses perizinan, sertifikasi mutu, mencari mitra, informasi ketersediaan ikan, maupun akses permodalan perbankan. Nilai investasi CS yang dipaparkan bisa saja berbeda tergantung kapasitas CS, sarana prasarana, dan Lokasi.

Dokumentasi



Gambar 14. Diskusi Bisnis Cold Storage mendukung Ketahanan Pangan

3.2.2.3. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri (Persen)

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur persentase pemenuhan kebutuhan ikan nasional dari ketersediaan pasokan produksi dari dalam negeri dan importasi hasil perikanan. Indikator ini bermanfaat untuk melihat kebutuhan dan ketersediaan bahan baku dari pasokan produksi dalam negeri dan pengambilan kebijakan pengendalian impor

Tabel 7. Target dan capaian IK 5

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Sd TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri	90,0	-	-	90,0	97,0	-	-	97,0	107,8	107,8	-	-

Berdasarkan tabel diatas pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir. Target indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri pada triwulan I adalah berupa prognosa 90 Persen dan target pada tahun 2025 adalah 90 Persen, Realisasi indikator ini pada triwulan I adalah berupa prognosa 97 Persen atau setara 107,8% dari target triwulan I dan setara 107,8% terhadap target tahun 2025, Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. ntuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 001 Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok dan PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 001 Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas dengan pagu awal sebesar Rp.900.000.000,-. Pagu efisiensi sebesar Rp. 138.749.000,- Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp.18.136.000,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp.99.670.637,- atau sebesar 11,07% terhadap pagu awal dan 82,64% terhadap pagu efektif.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Internalisasi Rekomendasi Pemasukan Hasil Pemasukan Hasil Perikanan

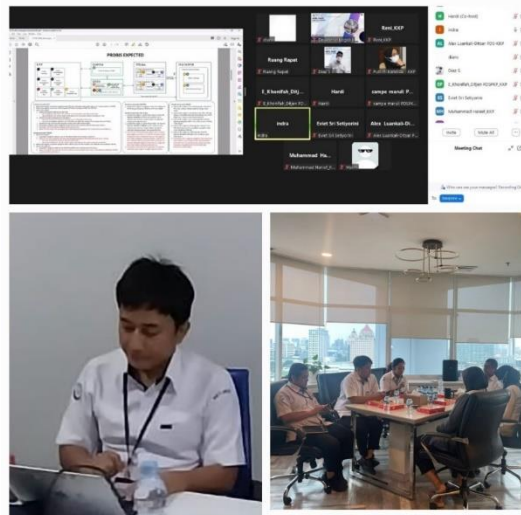
Dilaksanakan secara *luring* pada tanggal 06 Januari 2025. Kegiatan dipimpin Direktur Logistik dan dihadiri Ketua Kelompok Kerja Lingkup Direktorat Logistik, Penanggung Jawab Kegiatan Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, dan perwakilan Pusdatin dan Pelaksana Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan rekomendasi pemasukan hasil perikanan bagi pelaku usaha yang mengajukan usulan rencana kebutuhan dengan peruntukan bahan baku pemindangan, hotel restaurant catering dan pasar modern (horekapasmod), umpan, pereduksian/ekstraksi dan pelumatan.

Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Tahun 2025 telah disampaikan ke Kementerian Koordinator Pangan (sebelumnya kementerian perekonomian). Berdasarkan rakortas dengan Kemenko Pangan RKI 2025, harus mempertimbangan kinerja/realisasi importasi tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi kebutuhan ikan tahun 2025 lebih sedikit dari rekomendasi tahun sebelumnya. Namun demikian, jika pelaku usaha dalam perjalanan waktu telah

merealisasikan persetujuan impor yang didapat, bisa mengajukan lagi rencana kebutuhannya.

Dokumentasi



Gambar 15. Internalisasi Rekomendasi Pemasukan Hasil Pemasukan Hasil Perikanan

2. Pembahasan Rencana Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Baku Pemindangan

Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok Dit.Logistik, Anggota Timja Tata Kelola Rantai Pasok, Anggota Tim Dukungan Manajerial Dit.Logistik dan Pak Purwanto. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2025 di ruang rapat Akses Pasar Gedung Mina Bahari III lantai 15. Rapat bertujuan untuk membahas implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2025-2026.

Perlunya mengintegrasikan data profil risiko dari sistem Indonesia *Single Risk Management* (ISRM) ke dalam sistem in-house KKP untuk mendukung proses verifikasi impor. Sistem profil risiko atau disebut ISRM sedang dikembangkan untuk memberikan skor risiko bagi importir berdasarkan faktor-faktor seperti kepatuhan pajak, realisasi impor dan riwayat tindak pidana. Hal ini akan diintegrasikan ke dalam inhouse NK KKP.

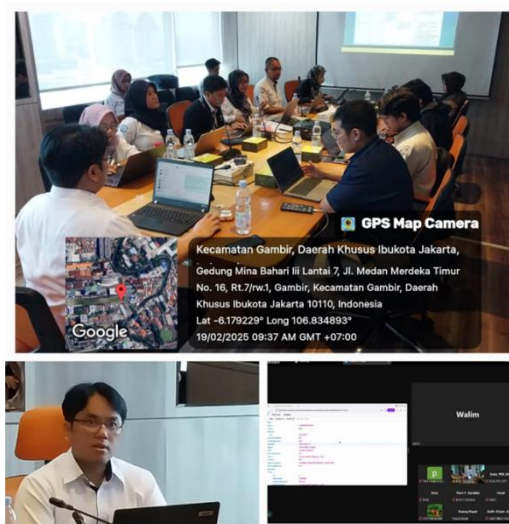
Untuk mengintegrasikan data ISRM ke dalam sistem inhouse NK KKP, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Membangun aliran data dari INSW ke sistem KKP.
- Melaksanakan tampilan data profil risiko pada dashboard KKP bagi verifikator.
- Buat format standar untuk skor risiko (misalnya, risiko tinggi, sedang, rendah).

- d. Menggabungkan data ISRM dengan kriteria penilaian risiko KKP yang ada.
- e. Melakukan diskusi teknis antara tim INSW dan KKP untuk menyelesaikan rincian implementasi.
- f. Uji sistem terintegrasi untuk memastikan transfer dan tampilan data yang tepat.
- g. Melatih staf KKP dalam menafsirkan dan menggunakan informasi profil risiko baru.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam melaksanakan verifikasi usulan kebutuhan impor.

Dokumentasi



Gambar 16. Pembahasan Rencana Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Baku Pemindangan

3. Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2025

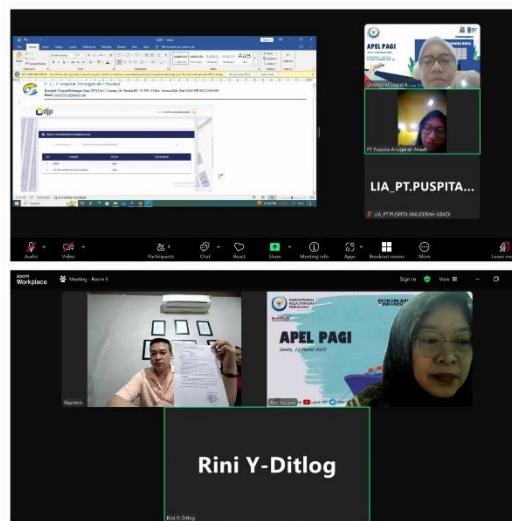
Kegiatan dilaksanakan secara daring pada tanggal 17,18,19,20,21 dan 24 Maret 2025 Pukul. 09.00 sampai dengan selesai. Latar belakang kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan neraca komoditas perikanan sebagaimana amanat Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan.

Berdasarkan usulan perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan tahun 2024 yang disampaikan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) pada Sistem INSW, Direktorat Logistik - Ditjen PDSPKP - KKP perlu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian usulan perubahan dimaksud. Kegiatan

dipimpin oleh Koordinator Kelompok Tata Kelola Rantai Pasok dan tim verifikasi yang terdiri dari perwakilan tim Direktorat Logistik, tim perwakilan dari Perwakilan Setdijen PDSPKP; Perwakilan Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan; Perwakilan Kepala Pusat Karantina Ikan; Perwakilan Direktur Pengolahan dan Bina Mutu; Perwakilan Direktur Pemasaran; Perwakilan Direktur Usaha dan Investasi.

Perusahaan yang hadir dan selesai untuk verifikasi dokumen dan penandatanganan pakta integritas. Perusahaan diminta untuk menyampaikan kekurangan dokumen dan memperbaiki usulan pada aplikasi SINAS NK.

Dokumentasi



Gambar 17. Verifikasi Pengajuan Perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan Tahun 2025

3.2.2.4. Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik (Persen)

Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana yang diserahkan ke masyarakat. Pemanfaatan sarana dan prasarana pada IKK ini adalah pemanfaatan BP Tahun 2024 oleh koperasi/kelompok usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang terdiri dari 10 unit Gudang Beku Portabel (GBP) dan 10 unit Kendaraan Berefrigerasi (KR). Monitoring pemanfaatan dan aktivitas pengelolaan BP berdasarkan form isian pemantauan berkala.

Optimalisasi pemanfaatan BP mengacu pada KEPDIRJEN PDSPKP Nomor 87 Tahun 2024 terdapat klausul terkait sanksi penerima BP sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Direktorat Logistik menekankan agar pemanfaatan BP dapat lebih optimal, akan memverifikasi ulang kemampuan pengelola serta melakukan pengalihan/penarikan aset jika tidak operasional sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok/koperasi lain yang membutuhkan.

Tabel 8. Target dan capaian IK 6

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Sd TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik	80,0	-	-	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai posisi akhir. indikator Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik pada tahun 2025 adalah sebesar 80 Persen pemanfaatan bantuan pemerintah dan indikator bersifat tahunan sehingga tidak ada realisasi pada triwulan I, Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I. untuk mencapai Indikator Kinerja ini, dilakukan kegiatan pada 1 (satu) Rincian Output (RO) yaitu QEG Bantuan Peralatan / Sarana 001 Sarana Penyimpanan Produk KP dengan pagu awal sebesar Rp.2.300.000.000,- pagu efisiensi sebesar Rp. 1.169.829.300,- Adanya blokir anggaran *Automatic adjustment* (AA) sebesar Rp. 1.039.997.300,- dan belum dilakukan penyesuaian pagu pada aplikasi Sakti. Adapun realisasi keuangan untuk mencapai Indikator ini sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp. 66.290.515,- atau sebesar 2,88% terhadap pagu awal dan 51,06% terhadap pagu efektif.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mencapai output adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Monitoring Pemanfaatan Bantuan Pemerintah berupa Kendaraan Refrigerasi dan Gudang Beku Portable

Dilaksanakan secara berkala pada bulan Januari – Maret 2025 dengan bersurat kepada penerima bantuan tahun anggaran 2024 melalui Dinas. Bahwa dihimbau untuk setiap penerima bantuan dapat memberikan laporan pemanfaatan pada form dan kuisioner yang telah disediakan yang mencakup semua informasi pemanfaatan bantuan yang telah diterima.

3.2.3. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

3.2.3.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Logistik. Indikator ini ditargetkan sebesar 95. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.

Tabel 9. Target dan capaian IK 7

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Sd TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik	95,0	80,0	80,0	95,0	95,0	80,0	80,0	95,0	100,0	100,0	12,0	12,0

Berdasarkan tabel diatas, pola perhitungan pada Indikator ini adalah nilai rata - rata, target indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik pada triwulan I adalah berupa prognosa 95 Persen dan target pada tahun 2025 adalah 95 Persen, Realisasi indikator ini pada triwulan I adalah prognosa 95 Persen atau setara 100% dari target triwulan I dan setara 100% terhadap target tahun 2025. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terdapat peningkatan target sebesar 12%, tingkat pertumbuhan realisasi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya meningkat 12%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Logistik pada triwulan I, antara lain: melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak, melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan.

3.2.3.2. Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)

Jumlah temuan BPK atas jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Direktorat Logistik atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti.

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 100%. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024.

Tabel 10. Target dan capaian IK 8

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Sd TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik	-	100,0		100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas penilaian indikator Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 100%, dan belum dapat dilakukan pengukuran pada periode Triwulan I. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2025. Adanya persamaan target antara tahun 2024 dengan tahun 2025 yaitu 100.

3.2.3.3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pada tahun 2025, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Tabel 11. Target dan capaian IK 9

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Sd TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik	-	80,0		81,0	-	80,0	-	-	-	-	100,0	-

Berdasarkan tabel diatas penilaian indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 81%, dan belum dapat dilakukan pengukuran pada periode Triwulan I. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2025. jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat peningkatan target tahun 2025 yaitu sebesar 1 %.

3.2.3.4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)

Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Direktorat Logistik merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Penilaian indikator ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target Direktorat Logistik sebesar 86. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024.

Tabel 12. Target dan capaian IK 10

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Sd TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik	-	84,0		86,0	-	84,45	-	-	-	-	-100,5	-

Berdasarkan tabel diatas penilaian indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik ini dilakukan pada Triwulan IV dengan target sebesar 86%, dan belum dapat dilakukan pengukuran pada periode Triwulan I. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2025. jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat peningkatan target tahun 2025 yaitu sebesar 2,3 %.

3.2.3.5. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi,

kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bag. SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKP Penyelesaian temuan LHP adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan atas laporan keuangan yang telah diperiksa.

Indeks profesionalitas ASN Direktorat Logistik tahun 2025 ditargetkan sebesar 87. Merupakan indikator lanjutan pada tahun 2024 sehingga dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2025. Perhitungannya adalah semesteran.

Tabel 13. Target dan capaian IK 11

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Sd TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik	-	87,0		87,0	-	88,60	-	-	-	-	101,8	-

Berdasarkan tabel diatas, penilaian indikator Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik ini dilakukan per semester dengan target sebesar 87 Indeks, dan belum dapat dilakukan pengukuran pada periode Triwulan I. Indikator kegiatan ini merupakan indikator lanjutan tahun 2024 sehingga bisa dibandingkan dengan tahun 2025. Adanya persamaan target antara tahun 2024 dengan tahun 2025 yaitu 87 Indeks.

3.3. Realisasi Anggaran Direktorat Logistik

Berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 02 Desember 2024, Direktorat Logistik mempunyai Pagu awal Rp.5.856.950.000,-. Dan berdasarkan tindaklanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2025, dan DIPA Rev 1 Nomor SP DIPA- 032.06.1.622131/2025 tanggal 22 Februari 2025, Direktorat Logistik mendapatkan pagu sebesar Rp. 1.797.575.500,- dengan tagging blokir sebesar Rp. 1.114.962.500,- sehingga pagu efektif setelah efisiensi sebesar Rp.682.613.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp 378.205.645,- atau sebesar 55,41% terhadap pagu setelah efektif efisiensi.(**sumber data Sakti SP2D**)

Adapun tabel realisasi anggaran Direktorat Logistik sebagai berikut :

Tabel 25. Realisasi anggaran Direktorat Logistik per 30 Juni 2024

No	Rincian Ouput	Blokir Automatic Adjusment (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase realisasi dari pagu setelah AA (%)
1	ABR.001. Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok	48.855.000	33.480.507	15.374.493	68,53
2	AEE.001 Kemitraan dalam rangka pengadaan, penyimpanan dan distribusi	151.045.000	63.761.892	87.283.108	42,21
3	BDG.001 Pelaku Usaha yang dibina dalam rangka penguatan sistem logistik	86.495.000	49.008.100	37.486.900	56,66
4	BMA.001 Profil ketersediaan dan kebutuhan hasil KP	90.680.000	83.393.905	7.286.095	91,97
5	PBR.001 Rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas	71.758.000	66.190.130	5.567.870	92,24
6	QDH.001 Pelaku Usaha yang menerapkan Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA)	103.948.000	16.080.596	87.867.404	15,47
7	QEG.001 Sarana Penyimpanan Produk KP	129.832.000	66.290.515	63.541.485	51,06
TOTAL		682.613.000	378.205.645	304.407.355	55,41

(sumber : Sakti)

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Logistik dari Januari sampai dengan Maret 2025. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Logistik berdasarkan aplikasi kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 104,40. Pencapaian nilai kinerja organisasi periode sampai dengan Triwulan I diperoleh dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

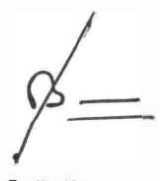
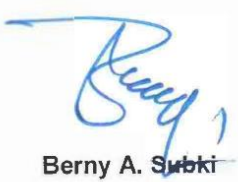
- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan (Persen); target 4,1 Persen; capaian 4,1 Persen atau 100% dari target; yaitu : dari 258 pelaku usaha dan telah melakukan registrasi ulang pada aplikasi STELINA sebanyak 32 pelaku usaha.
- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Persen); target 3 Persen; Capaian 3 Persen atau 100% dari target; yaitu : dari 86 pelaku usaha meningkat sebanyak 3 pelaku usaha yang telah mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan uji petik penilaian CDIB, yaitu Gudang Samudra yang berlokasi di Kota Bogor (Pelaku Usaha Penyimpanan), Gumuk Joni Sagala (GJS) yang berlokasi di Kota Bogor (Pelaku Usaha Penyimpanan), dan PT. Citra Perisasi Lintansindo (CPL), yang berlokasi di Kota Bekasi (Pelaku Usaha Pengangkutan)
- IKK Kinerja Logistik Ikan (Indeks); target 72 Indeks; capaian 72 Indeks atau 100% dari target;*** yaitu : berdasarkan data hasil olah kinerja logistik yang ada di beberapa koridor.
- IKK Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku (Persen); target 5 Persen; Capaian 5,8 Persen atau 116% dari target; yaitu : peningkatan dari 103 pelaku usaha yang Pelaku Usaha yang telah Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku sebanyak 6 pelaku usaha sehingga total adalah 109 pelaku usaha.
- IKK Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri (Persen); target 90 Persen; capaian 90 Persen atau 107,78% dari target;*** yaitu berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan dalam negeri bulan januari sampai maret.
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen) ; target 95 Persen; capaian 100 Persen atau 105,26%

*** *Prognosa*

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Logistik Triwulan I Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

1. Lampiran

1.1. Perjanjian Kinerja Direktorat Logistik

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132 LAMAM www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT LOGISTIK	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Berny A. Subki Jabatan : Direktur Logistik Selanjutnya disebut Pihak Kesatu. Nama : Budi Sulistiyo Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 20 Januari 2025 Pihak Kedua, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  Budi Sulistiyo	Pihak Kesatu, Direktur Logistik  Berny A. Subki

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT LOGISTIK**

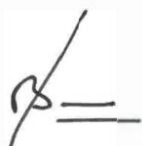
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Penerapan Ketertelusuran Produk Perikanan	1.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Ketelusuran Produk Perikanan (Persen)	27,2
		2.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Distribusi Ikan yang Dibina dalam Penerapan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Persen)	20
2.	Meningkatnya Kinerja Logistik Ikan Dalam Negeri	3.	Kinerja Logistik Ikan (Indeks)	72
		4.	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Menerapkan Sistem Pengelolaan Gudang Beku (Persen)	20
		5.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Ikan dari Produksi Dalam Negeri (Persen)	90
		6.	Persentase Pemanfaatan Sarana Prasarana Logistik (Persen)	80
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)	95
		8.	Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)	100
		9.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Logistik (Persen)	81
		10.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Logistik (Nilai)	86
		11.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Logistik (Indeks)	87

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
Logistik Hasil Kelautan Dan Perikanan	5.856.950.000
Total Anggaran Direktorat Logistik Tahun 2025	5.856.950.000

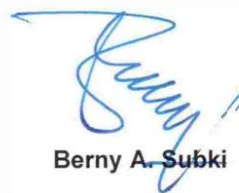
Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyo

Pihak Kesatu,
Direktur Logistik



Berny A. Subki